

EFEKTIVITAS PENERTIBAN ANAK SEKOLAH BOLOS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

Mochammad Hibatullah

NPP. 30.0557

Asal Pendaftaran Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Praktik Perpolisian tata Pamong

mochammadbungsuhiibatullah@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Didi Suidiana, SE., MM

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): there are school children who skip school during school hours (truants student) in the Garut City area, while it has been clearly explained that it is not justified to skip school for students. **Purpose:** to find out how the effectiveness of the Garut Regency Satpol PP in controlling school truant children is it in accordance with existing rules. **Method:** This research uses qualitative methods (Quality Research), and uses data collection techniques consisting of observation, interviews and documentation. **Result:** The results of the study show that the Satpol PP of Garut Regency has properly controlled truant school children in the Garut City area and used a persuasive approach. However, the policing carried out by Satpol PP has not been taken into account by the truant school children and it can be seen that there are still many school children who are truant in the Garut City area. Obstacles for the Satpol PP in controlling include the school not being able to impose Drop Out (DO) sanctions due to the existence of the Minister of Education and Culture Number 82 of 2015 concerning the prevention and control of acts of violence in the educational unit environment. **Conclusion:** With this in mind, the Satpol PP of Garut Regency must be firm and thorough in controlling truant school children. If this is not followed up on, it will have a negative impact on the performance of the Garut Regency Satpol PP because it can only collect data and provide advice to the school regarding the behavior of its students so that the school can only submit decisions to the parents of students.

Key words: Effectiveness, Satpol PP, and truants student

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): terdapat Anak sekolah bolos melaksanakan kegiatan membolos pada saat jam sekolah di kawasan Kota Garut sedangkan sudah jelas diterangkan bahwa tidak dibenarkan untuk melakukan Membolos sekolah bagi para siswa. **Tujuan:** untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Satpol PP Kabupaten Garut dalam melakukan penertiban Anak sekolah bolos apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*Qualitative Research*), dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Garut sudah dengan baik melakukan penertiban Anak sekolah bolos di kawasan Kota Garut dan menggunakan pendekatan persuasif. Akan tetapi penertiban yang dilakukan Satpol PP belum diindahkan dengan baik oleh para Anak sekolah bolos dan bisa ditinjau bahwa masih banyak para Anak sekolah yang membolos di wilayah Kota Garut. Hambatan Satpol PP dalam

melakukan penertiban diantaranya pihak sekolah tidak bisa memberikan sanksi Drop Out (DO) karena adanya permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. **Kesimpulan:** Dengan hal ini Satpol PP Kabupaten Garut harus dengan tegas dan tuntas dalam menertibkan Anak sekolah bolos. Jika hal ini tidak ditindak lanjuti akan berdampak buruk pada kinerja Satpol PP Kabupaten Garut karena hanya dapat mendata dan memberikan himbauan kepada pihak sekolah terkait perilaku muridnya sehingga sekolah hanya dapat menyerahkan keputusan kepada orang tua murid.

Kata kunci : Efektivitas, Satpol PP, dan Anak sekolah bolos

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat fokus pada perbaikan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah Indonesia dalam mengelola sistem pendidikan nasional saat ini. Berdasarkan Peraturan Presiden No 133 Tahun 2020 yang merinci APBN 2021, pemerintah mengalokasikan dana untuk pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp184,5 triliun, ke Dana Daerah dan Dana Desasebesar Rp299,1 triliun dan hibah sebesar Rp66,4 triliun. ribuan milyar.¹ Angka anggaran ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang giat meningkatkan kualitas pendidikan saat ini. Dana yang diberikan pemerintah melalui APBN bertujuan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terstruktur untuk menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mewujudkan kepribadiannya yang tersembunyi. Seorang peserta didik harus memiliki kecerdasan spiritual, kemampuan mengendalikan emosi, budi pekerti, kecerdasan, budi pekerti yang baik, serta kemampuan lain yang diperlukan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan dibuat sistem pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi dari peserta didik agar mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan Untuk menjadi warga negara yang menjunjung demokratis dan bertanggung jawab, pendidikan diperlukan bagi manusia. Sekolah merupakan salah satu tempat pendidikan mengembangkan potensi peserta didik. Sekolah merupakan bagian dari pendidikan dimana pembelajaran berlangsung. Belajar adalah peristiwa atau situasi yang sengaja dirancang untuk mendukung dan memajukan proses belajar dengan harapan dapat mendorong kreativitas siswa².

Bahkan, kenakalan remaja banyak terjadi di sekolah. Dari Masa remaja merupakan masa yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat dan signifikan. Perubahan terjadi secara fisiologis, emosi, sosial, dan intelektual. Selain itu, remaja ini digambarkan tidak menentu, emosional, tidak stabil dan tidak dapat diprediksi, sering disebut sebagai periode badai dan stres³. Perilaku tersebut umumnya dianggap sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja bukanlah hal yang baru, namun masalah tersebut sudah ada sejak lama. Kenakalan remaja pada setiap generasi berbeda beda dikarenakan pengaruh dari lingkungan budaya dan sikap mental masyarakat kontemporer. Perilaku yang baik sekarang belum tentu dianggap baik oleh masyarakat pada masa lalu.⁴

¹ Nandar ahmad faizal (<https://anggaran.kemenkeu.go.id/>)

² Nazarudin. (2007). Manajemen Pembelajaran. Yogyakarta : Teras.

³ Hurlock, Elizabeth. (2009). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Erlangga.

⁴ Maulia Indriana Ghani (<https://www.zenius.net/blog/materi-sosiologi-nilai-dan-norma-sosial>)

Salah satu kenakalan siswa yang dijumpai di sekolah adalah siswa membolos. Membolos adalah pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah⁵. Lompat tali merupakan salah satu kebiasaan buruk siswa yang tidak biasa, yaitu tidak disiplin, tidak berpikiran terbuka serta kebiasaan negatif yang perlu dihilangkan. Pada dasarnya, siswa keluar rumah dengan berseragam tetapi tidak pergi ke sekolah. Ketidakhadiran tanpa alasan dari sekolah (Alpha) juga dapat dianggap sebagai ketidakhadiran di sekolah. Siswa yang mempelajari game lebih memilih pergi ke tempat nongkrong atau game station, toko buku bahkan warnet yang menawarkan game online daripada pergi ke sekolah untuk belajar. Menari adalah kepribadian seseorang yang melanggar tata tertib sekolah, dan siswa yang membolos sering melakukan hal-hal buruk yang merugikan diri sendiri dan orang lain. merugikan sekolah dan mengganggu ketentraman dan ketertiban warga Garut Sesuai dengan perbup Garut no 65 tahun 2021 tentang rencana kerja satuan polisi pamong praja Berdasarkan tugas dari Bupati Garut yaitu melakukan kegiatan Gerakan Disiplin Daerah (GDD) dimulai Bulan Juni sampai bulan Desember 2022. Dengan surat perintah Tugas kepada Kepala Satpol PP yang ditandatangani oleh Bupati Garut Nomor: 800/10191/Sat Pol PP pada tanggal 18 Juni 2020 .dan surat Tugas dari Kasat POL PP ke Kabid dan Sekertaris Sat Pol PP Nomor : 800 /513 –Sat Pol PP/2020 tanggal 24 Juni 2020. Untuk melaksanakan kegiatan dari GDD Gerakan disiplin daerah yaitu penertiban anak sekolah bolos/ANSEBOL⁶. Anak sekolah yang sering membolos memberikan dampak buruk terhadap siswa lainnya di sekolah ataupun di luar sekolah dengan mengajak mereka melakukan perbuatan buruk.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut mempunyai program operasi yang sejalan dengan Efektifitas Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) berdasarkan Perda No. 18 tahun 2017 tentang ketertiban, kebersihan dan ketertiban keindahan, Salah satunya adalah Program (GDD) dan (ANSEBOL) Maka dari itu penggunaan teori Efektivitas menurut Duncan dalam buku Steers (1985;53) untuk penyelesaian permasalahan Anak Sekolah Bolos (ANSEBOL) tepat karena Efektivitas adalah kemampuan memilih sasaran dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai sasaran secara tepat dan cepat dengan keberhasilan dan Mengenai klaim bahwa efektivitas pelaksanaan program dipengaruhi oleh perilaku manusia.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan efektivitas penertiban anak sekolah bolos oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten Garut fenomena pelanggaran Trantibum terkhususnya anak sekolah yang membolos pada saat waktu sekolah di Kabupaten Garut masih banyak dan mengalami peningkatan.

Tabel 1. 1 Jumlah Pelanggaran ANSEBOL

No	Kegiatan	Bulan	Jumlah Orang (Siswa) yang ditertibkan di Kecamatan Kota Garut	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penertiban Anak Sekolah Bolos pada Waktu Jam Sekolah	Juni	10 Orang Siswa	
		Juli	18 Orang Siswa	
		Agustus	20 Orang Siswa	
		September	24 Orang Siswa	

Sumber : Laporan kegiatan satuan polisi pamong praja bidang trantibum (2022)

⁵ Gunarsa, Singgih dan Ny. Y. Singgih, (2002). Psikologi Untuk Membimbing. Jakarta: BPK Gunung Mulia

⁶ peraturan bupati Garut nomor 65 tahun 2021 tentang rencana kerja satuan polisi pamong praja

Pelanggaran trantibum khususnya anak putus sekolah setiap bulannya meningkat seperti terlihat pada Tabel 1.1, dimana jumlah pelanggar di Ansebol Kecamatan Kota Garut meningkat dibandingkan bulan Juni yang tidak ada sama sekali. Awalnya hanya ada 10 siswa pada bulan September menjadi 24 siswa. Penyebabnya karena kesadaran hukum masyarakat, siswa miskin serta kurangnya sosialisasi aturan dan ketegasan aparat, yang membuat warga ragu dan berani melanggar. Efektivitas sangat penting untuk implementasi kebijakan yang sukses dan efektif pada waktu yang tepat. Meski banyak pelanggaran kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Garut nomor 18 tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) tersebut menjadikan program dari kebijakan tersebut yaitu Perbup Garut No 65 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 kurang Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka harus dibarengi dengan tindakan personel Satpol PP Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut membutuhkan efektivitas yang lebih baik, operasi yang lebih aktif dan harus diperkuat untuk mencegah pelanggaran. terkait anak membolos dapat terwujud. Sebaliknya, keberadaan Satpol PP di masyarakat sering diidentikkan dengan Satpol PP yang arogan, keras dan apa pun selain manusia dan dipandang oleh masyarakat sebagai pihak yang vokal dalam hal ini. "tidak ada hati". Oleh karena itu, jika anggota polisi sipil bertekad menindak sejumlah pelanggaran perda, dikhawatirkan persepsi masyarakat terhadap Satpol PP akan memburuk. Sebagai bagian dari misi Satuan Polisi Pamong Praja dengan permasalahan siswa yang membolos yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Garut, adanya permasalahan tersebut memaksa Satuan Polisi Pamong Praja turun tangan melakukan penggeledahan

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penertiban ataupun penanganan gangguan trantibum. Penelitian Salman (2022) berjudul Efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di Kota Sorong Provinsi Papua Barat dapat disimpulkan bahwa peranan satuan polisi pamong praja itu sangat penting dalam pelaksanaan satuan polisi pamong praja dalam penanganan penertiban dari pedagang kaki lima di kota sorong . Penelitian Warsito (2011) yang berjudul Analisis Tingkat Efektivitas dari Satuan polisi pamong praja dalam mewujudkan program ketertiban di wilayah kelurahan cempaka putih kota jakarta pusat menemukan bahwa berhasil guna, dan berdaya guna dan tepat guna maka sangat menentukan keberhasilan dari mewujudkan ketertiban lingkungan yang tadinya kumuh oleh pedagang kaki lima, lingkungan menjadi bersih, rapi dan indah. Penelitian Abdulah (2010) dengan judul Efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kecamatan duren sawit jakarta ti menemukan bahwa dengan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja cukup efektif karena setelah ditertibkan wilayah yang tadinya kumuh menjadi bersih, rapi dan indah karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari satuan polisi pamong praja. Penelitian Feny Annisa Damayanti (2013) dengan judul Studi tentang perilaku membolos pada siswa sma swasta di surabaya menemukan Hasil dari penelitian ini bahwa perilaku membolos itu dapat mempengaruhi nilai akademik disekolah, karena tidak bisanya menyelesaikan topik mata pelajaran pada hari itu juga. Penelitian Cucu Ardian (2021) Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati Dalam Mewujudkan Efektivitas Kegiatan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menemukan Hasil membuktikan bahwa implementasi kebijakan ketertiban, kebersihan dan keindahan berpengaruh terhadap kinerja satuan tugas. Peran Merpati dalam mengimplementasikan efektivitas program untuk mencapai ketertiban, kebersihan dan keindahan

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni anak sekolah bolos sedangkan dalam penelitian terdahulu yaitu dalam pedagang kaki lima atau terkait kinerja dari satuan polisi pamong praja dalam penelitian Salman, Warsito, dan Abdulah selain itu perbedaan penggunaan teori seperti dalam penelitian warsito menggunakan efektivitas menurut Soewamo Handayan ingrat (1998:16), feny annisa damayanti menggunakan teroti efektivitas Jensen (dalam Sarwono,2012) dan cucu ardian menggunakan teori efektivitas Iskandar (2019) dan yang terakhir perbedaan terletak pda lokasi penelitian dimana peneliti berlokasi di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang hanya sama dengan Penelitian terdahulu milik Cucu Ardian(2021)

!5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini Bertujuan Untuk Menganalisis Efektivitas, Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Serta Upaya Penertiban Anak Sekolah Bolos Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

II. METODE

Penelitian Skripsi yang dilaksanakan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengaktualisasikan kegiatan lapangan yaitu mengamati, melihat, menganalisa atau mengkaji permasalahan yang sedang terjadi,⁷ dengan itu penulis dapat terlibat aktif dalam kegiatan sehari-hari di lokasi praktek lapangan. Pendekatan induktif merupakan cara penulis untuk mencapai suatu kesimpulan dengan mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang terjadi serta dianalisis dan diorganisasikan hasil pengamatan tersebut yang bersifat khusus sehingga membentuk suatu hasil yang terangkai dan saling berkaitan satu sama lain untuk menyusun suatu argument yang bersifat umum⁸. Dengan demikian pengamatan dalam kegiatan praktek lapangan yang dilaksanakan penulis merupakan kegiatan pengumpulan data dan menganalisis data yang diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa benda, hal atau orang yang dapat diamati dan memberikan data maupun informasi yang sesuai⁹ dengan focus penelitian yang telah ditetapkan. Data primer dalam penelitian ini adalah informan yaitu seseorang yang menguasai pokok permasalahan atau yang sesuai dengan indikator dalam penelitian dan memiliki informasi serta bersedia membagi informasi tersebut. Karena keterbatasan waktu dan sibuknya pejabat yang berwenang maka informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum beserta beberapa anggota satuan polisi pamong praja yang bekerja di lokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara¹⁰ yaitu: Observasi Dalam teknik ini peneliti hadir sebagai praja magang yang langsung ikut dalam kegiatan kantor. Peneliti langsung mengamati proses kegiatan kantor

⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta:Prenada Media Group, 2014).

⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013).

⁹ Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif Danr & D)*, 22nd ed. Bandung: ALFABETA, hlm. 308.

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).

mulai dari kebiasaan, budaya, serta karakteristik pegawai yang ada disana. Peneliti juga mengetahui bahwa observasi sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena - fenomena yang nampak. Wawancara Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur karena wawancara semi terstruktur terdiri dari beberapa pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan yang teridentifikasi atau mungkin mengajukan pertanyaan tidak terstruktur yang tersedia dalam daftar. pertanyaan tetapi tetap memfokuskan pembahasan pada topik yang sedang dipelajari. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara semi terstruktur. Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan informasi tersebut dengan penertiban anak sekolah bolos oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Dokumentasi penulis mengumpulkan dokumentasi berupa hasil wawancara dan kegiatan di lapangan yang besertabukti laporan dari LAKIP dan tulisan yang berkenaan dengan ANSEBOL. Teknis Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dilakukan pada pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (dalam Sugiyono, 2013:246) di dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *concluding drawing/verification*. Melalui tahapan tersebut, peneliti telah melakukan pencatatan secara rinci selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat kemudian menyimpulkan sesuai dengan bukti - bukti kuat yang mendukung.¹¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penertiban Anak Sekolah Bolos Di Kabupaten Garut

Penertiban ANSEBOL sebagai bagian dari usaha perbaikan pendidikan di kabupaten garut yang memiliki potensi untuk menciptakan peluang meningkatnya kualitas SDM terutama penertiban ini bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan yang memadai dalam sector formal. Namun maraknya keberadaan ANSEBOL juga dapat menimbulkan masalah bagi pemerintah maka dari itu perlu adanya pelaksanaan penertiban.

Kegiatan penertiban bagi Anak sekolah bolos merupakan suatu hal yang cukup sulit bagi pemerintah dalam proses penertiban Anak sekolah bolos. Selain jumlahnya semakin banyak, keberadaan Anak sekolah bolos disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor lingkungan. Masalah pengendalian absensi siswa semakin meningkat dan membutuhkan ruang yang cukup luas untuk kegiatan mereka. Adanya siswa yang membolos dari sektor publik tidak dapat dikesampingkan, karena keberadaan mereka merupakan salah satu indikator kualitas pendidikan di daerah, khususnya di sekolah negeri.

Serangkaian kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan terobosan dalam pelaksanaan tindakan dan tindakan yang disusun secara runtut oleh pemerintah Kabupaten Garut, terutama dengan menerapkan konsep-konsep yang tertuang dalam peraturan daerah dan membuat strategi untuk mengurangi intensitas pembolosan. Adapun upaya yang bisa dipertimbangkan oleh satuan polisi pamong praja terhadap penertiban anak sekolah bolos yang bisa di kordinasikan dengan dinas terkait khususnya Dinas Sosial Kabupaten Garut dengan sebagai langkah tindak lanjut dari anak

¹¹ Hardani., dkk, (2020) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group

sekolah bolos atau bahkan diberhentikan atau melakukan penguduran diri yaitu dengan :

a. Aplikasi SIMANJA

Peluncuran Aplikasi SIMANJA (Sistem Kemandirian Remaja) oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan dasar dan tujuan khusus. Tujuan dasarnya ialah meningkatkan keberfungsian sosial dari alumni UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (PPSBR) yang nantinya dapat menyelesaikan masalah masing-masing. Sedangkan tujuan khususnya yaitu agar para alumni UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (PPSBR) bisa mandiri, bekerja dan menghasilkan uang, serta membuat usaha kecil-kecilan maupun bekerja di suatu perusahaan. Dengan adanya aplikasi SIMANJA, pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tidak perlu mengunjungi secara langsung untuk melakukan kegiatan monitoring terhadap alumni UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (PPSBR), sehingga dapat memperkecil pengeluaran dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Di dalam aplikasi SIMANJA terdapat beberapa hal yang harus diisi oleh alumni UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (PPSBR), seperti mengunggah foto kemandiriannya disertai dimana tempat bekerja, posisi atau jabatan yang sedang dipegang, serta periode masa kerja. Jika ingin melakukan perubahan mengenai data diri, maka pengguna aplikasi SIMANJA dapat mengubahnya di profile menu dimana pengguna aplikasi SIMANJA juga dapat mengganti foto profil akun selanjutnya sosial media. Dengan adanya aplikasi simanjamungkin bisa mmebantu dari beberapa anak sekolah bolos yang bahkan berhenti sekolah sehingga dengan adanya aplikasi simanja bisamemberikan edukasi terkait pelatihan yang ada nantinya di UPTD.

Ada beberapa cara yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan penertiban Anak sekolah bolos di kawasan Kota Garut diantaranya sebagai berikut :

a. Anak Sekolah Bolos Yang Melakukan tindak pidana ringan.

Aparat segera turun ke tempat kejadian untuk memeriksa siswa yang tidak hadir yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, dan mereka yang melanggar peraturan akan ditindak di tempat sesuai peraturan yang berlaku. Sosialisasi dan tindakan ringan saat kami melakukan razia atau denda terhadap mereka yang melanggar aturan yang berlaku dan membawa mereka ke sekolanya masing-masing atau kita tegur di tempat. Sedangkan untuk anak-anak yang bolos sekolah cukup sulit diatur karena diketahui para siswa bermain kucing-kucingan dengan anggota satpol pp tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan di wilayah Kota Garut, pemerintah dengan dukungan Satpol PP melakukan pemantauan terhadap siswa di tempat tersebut. Petugas melakukan pengecekan rutin setiap hari dari pagi sebelum Ashar dan juga tergantung situasi dan kondisi. Dengan alasan tidak lagi bersekolah dengan situasi siswa membolos sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Satpol PP setiap hari berkeliling halaman sekolah untuk memantau siswa yang melanggar peraturan, saya juga siswa yang tidak mengulangi perilaku membolos yang merugikan warga Tapi di antara kami, membolos hanya bosan dengan kegiatan sekolah dan pekerjaan rumah.

b. Melakukan penertiban secara berkala

Untuk mengatasi permasalahan di wilayah Kota Garut, pemerintah dengan dukungan

Satpol PP melakukan pemantauan terhadap siswa di tempat tersebut. Petugas melakukan pengecekan rutin setiap hari dari pagi sebelum Ashar dan juga tergantung situasi dan kondisi. Dengan alasan tidak lagi bersekolah dengan situasi siswa membolos sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Satpol PP setiap hari berkeliling halaman sekolah untuk memantau siswa yang melanggar peraturan, saya juga siswa yang tidak mengulangi perilaku membolos yang merugikan warga Tapi di antara kami, membolos hanya bosan dengan kegiatan sekolah dan pekerjaan rumah.

c. Sosialisasi

Untuk memudahkan penertiban siswa yang membolos di Kota Garut. Pihak Satpol PP terlebih dahulu melakukan tindakan sensitif sebelum bertindak dengan mendeportasi barang tersebut. Informasikan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh melakukan kegiatan negatif dan merugikan masyarakat di sini dan petugas menunjukkan peraturan pemerintah Kabupaten yang tercantum dalam peraturan daerah Garut Nomor 18 Tahun 2017. Dengan melakukan ini dan dibantu oleh beberapa anggota Satpol PP telah menuntut dan menerapkan sanksi berupa pendataan agar hal ini tidak terjadi lagi dan memberikan beberapa latihan fisik untuk ANSEBOL. Pengendali akan memantau catatan dan akan ada instruksi atau penjelasan tentang larangan putus sekolah yang mengkhawatirkan

3.2 Faktor Pendukung Efektivitas Penertiban Anak Seklah Bolos

Hal-hal yang dianggap sebagai faktor pendukung adalah kondisi sosial politik dan hukum. Kondisi sosial, politik dan hukum adalah kondisi di mana orang mendukung atau mendukung dan antusias terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penertiban Anak sekolah bolos.

1. Kesadaran Anak sekolah bolos terhadap Peraturan Pemerintah Walikota Nomor 18 Tahun 2017

Dengan begitu, siswa sadar dengan akan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 yang digunakan untuk mengaturnya. Dan setiap bagian Satpol PP sudah terkendali, mereka sudah tahu bahwa mereka bersalah menempatkan barangnya disana dan tanpa pikir panjang mereka langsung bergegas memindahkan barang dari tempat ini.

2. Adanya Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Seluruh Kepala Sekolah.

Keberadaan pemerintah sebagai regulator dan sebagai pengambil keputusan merupakan salah satu faktor yang membantu Satpol PP bertindak dan melaksanakan perda kota. Peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam segala tindakan dan kebijakan akan menjadi kerangka tindakan Satpol PP dan mengikat karena kedudukannya dalam kebijakan pemerintah .

3. Anak sekolah Mudah Diamankan

Setiap kali dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Satpol PP. Mahasiswa di wilayah Kota Garut sangat disiplin dan tidak pernah menolak atau keberatan dengan kebijakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Hal ini karena para siswa percaya bahwa mereka benar-benar membolos di tempat ini dan kehadiran mereka di sini diatur oleh peraturan pemerintah setempat.

4. Teknik Operasional

sangat berpengaruh dalam Penegakan Peraturan Daerah dimana harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Penertiban anak sekolah bolos kita sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu pengarahan terlebih dahulu kepada pelanggar kemudian sosialisasi mengenai perda kepada korban dan selanjutnya pembinaan serta pemberian sanksi bagi anak sekolah atau bahkan pihak sekolah yang lalai dalam mengatur siswanya yang tidak bisa mengikuti pelajaran pada saat jam nya.

5. Sanksi

Sanksi merupakan tindakan atau hukuman bagi pelanggaran ketentuan undang-undang. Sanksi yang diberikan sesuai dengan SOP yang berlaku baik penindakan preventif non yustisial maupun penindakan yustisial namun tidak menimbulkan korban. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur satuan Polisi Pamong Praja memuat penindakan terhadap pelanggar hukum. Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 sesuai dengan SOP yang berlaku Untuk sanksi itu pasti ada dan tidak akan pernah hilang serta terus berjalan.

Untuk penertiban anak sekolah biasanya kita beri teguran dan surat peringatan sampai pada surat peringatan ke-3 (tiga). Ketika surat peringatan tidak direalisasikan oleh siswa tersebut yang bersangkutan bersma orang tua maka akan diberikan surat pengunduran diri yang ditanda tangani oleh siswa tersebut bersama orang tua dan bermaterai dan pemberhentian serta. Biasanya untuk proses pengeluaran siswa tidak bisa dilakukan oleh pihak sekolah dan dengan adanya surat yang menyatakan pernyataan pengunduran siswa tersebut dan diketahui pihak orang tua dan sekolah.

3.3 Faktor Penghambat Efektivitas Penertiban Anak Seklah Bolos

Hambatan adalah hambatan atau masalah yang dihadapi dalam program kegiatan, untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal, harus dilakukan upaya untuk mengatasi kendala atau hambatan alam. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya, Satpol PP mengalami kendala terkait penerapan Perda No 18 Tahun 2017.

Dalam prosesnya, ada beberapa faktor yang menghambat pemerintah dalam menertibkan siswa yang membolos di wilayah Kota Garut, antara lain sebagai berikut :

1. Sistem Persuasif Saat Penertiban Anak Sekolah Bolos

Dalam penertiban anak yang tidak bersekolah khususnya di wilayah Kota Garut, Satpol PP menerapkan sistem persuasif yaitu bersikap santun, bijaksana dan cermat dalam menjalankan tugasnya. . Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa tidak menganggap Satpol PP tidak baik di mata mereka. karena tujuan Satpol PP dalam proses penertiban hanya untuk menerapkan peraturan kota dan dapat menciptakan ketertiban umum agar semua pihak dapat menggunakan angkutan umum. Dan tidak semua siswa yang membolos di wilayah Kota Garut ditertibkan oleh Satpol PP karena mereka yakin jika siswa tidak mengganggu ketertiban kota maka tidak akan ditertibkan.

2. Anak sekolah bolos memiliki lingkungan yang buruk dan terprovokatif

Melaksanakan penertiban Siswa yang bolos sekolah di Kota Garut tidak melaksanakan niatnya untuk tidak melakukan pelanggaran kembali. Masalah pendidikan membuat mereka malas sekolah. Karena mereka merasa di sekolah mereka hanya duduk dan mendengarkan guru tanpa ada pelatihan atau pendidikan untuk mengembangkan bakatnya. Terkadang siswa bolos sekolah hanya untuk mencari ketenangan dan identitas diri di luar sekolah, seperti bergabung dengan geng motor atau kelompok orang yang tidak bertanggung jawab atas aktivitasnya. Tujuan pemerintah Kabupaten khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut adalah untuk melakukan penertiban agar dua unsur antara pemerintah dan masyarakat dapat terjaga.

3. Pihak sekolah yang tidak bisa bertindak lebih tegas

Filosofi pendidikan adalah anak berhak mendapatkan pendidikan. Jika siswa diberhentikan karena melakukan perbuatan melanggar hukum tentu tidak boleh, dan itu tindakan keliru, pihak sekolah harus mencontohkan seperti orang tua yang melihat anaknya melakukan perbuatan keliru tentu tidak mungkin orang tua langsung mengatakan si anak berhenti menjadi anaknya. Demikian juga lembaga pendidikan jangan mengambil sikap memberhentikan siswa dari sekolah, tetapi sebaliknya harus didik lebih jauh lagi, Ia mengatakan, seorang anak datang ke sekolah berbeda dengan pegawai yang datang ke kantor. Kalau anak datang ke sekolah jika melakukan perbuatan yang keliru maka harus didik lebih jauh lagi, tapi kalau pegawai datang ke kantor terus melakukan tindakan melanggar tentu konsekuensinya adalah sanksi atau bisa saja diberhentikan.

lembaga pendidikan harus ber konsultasi untuk mencari solusi agar siswa bersangkutan tetap bersekolah. Mungkin solusinya siswa bersangkutan bisa pindah sekolah, tidak boleh anak diberhentikan dari sekolah dan mungkin membuat suatu perjanjian dengan orang tua apabila si anak melakukan pelanggaran selama 3 kali atau mendapatkan SP3 bertanda tangan materai orang tua dan pihak sekolah mungkin bisa sebagai wujud ketegasan dalam berpendidikan, atau siswa yang dikeluarkan atau diberhentikan oleh pihak sekolah bisa di sarankan kepada Dinas Sosial Kabupaten garut dalam pemberian pelatihan agar siswa yang membolos bahkan putus sekolah bisa memberikan manfaat bagi masyarakat terkhususnya kabupaten Garut.

4. Faktor Lingkungan dan Keluarga

Dalam penertiban anak sekolah bolos terdapat faktor sosial budaya dari penertiban anak sekolah yang membolos, anak sekolah yang membolos cenderung tidak mendapatkan kasih sayang di rumah atau di lingkungan tempat dimana mereka berteman atau bermain, hal tersebut mempengaruhi mereka apalagi dengan tingkat perceraian di garut yang tinggi kasus perceraian di Kabupaten Garut setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hingga saat ini, PA Garut mencatat lebih 3.525 kasus gugatan perceraian yang ditangani sejak awal tahun 2022 setiap harinya pihaknya menangani 20 hingga 30 perkara perceraian Kasus perceraian di Kabupaten Garut, dari data yang dimilikinya, setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga 1000 kasus. Dari sejumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Garut, 80 persen di antaranya adalah kasus perceraian. Ia mengatakan bahwa mereka yang melakukan gugatan cerai memiliki rentang usia yang bervariasi, namun umumnya mereka yang menggugat cerai berusia 40 tahun ke bawah. Maka memang salah satu menjadi alasan bahwa peran keluarga sangat penting dalam mendidik anak agar tidak melakukan kegiatan negatif di lingkungan masyarakat seperti contoh kecilnya membolos sekolah.

3.4 Efektivitas Penertiban Anak sekolah bolos Di Kabupaten Garut

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu program yang dicapai dengan menyesuaikan beberapa metrik selama pelaksanaannya. Untuk melihat keefektifan penertiban anak membolos seperti yang telah dijelaskan di atas, efektivitas penertiban pembolosan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dapat ditelusuri melalui hasil wawancara dengan menganalisis beberapa dimensi dari teori efektivitas Menurut Richard M. Streers seperti

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah suatu pola keseluruhan mengenai upaya pencapaian tujuan sebagai suatu proses. Dalam organisasi satuan polisi pamong praja Kabupaten Garut memiliki peran untuk pegawainya dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai amatlah penting, jika seorang pimpinan memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk berprestasi lebih baik lagi, maka pegawainya akan lebih terpacu untuk lebih meningkatkan prestasi kerjanya dan hasil yang diharapkan bahkan program kegiatan yang akan dilaksanakan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Maka pimpinan perlu memotivasi pegawai agar jangan cepat puas terhadap hasil kerjanya selama ini, dan terus mendorong pegawai untuk memberikan hasil kerja yang terbaik.

a. Keberhasilan

Keberhasilan dalam pelaksanaan penertiban merupakan salah satu proses dalam pencapaian tujuan oleh karena itu, agar pencapaian tujuan semakin terjamin dan efektif maka diperlukan jadwal pelaksanaan kegiatan penertiban yang jelas agar dapat memaksimalkan waktu dalam pelaksanaan penertiban. Pencapaian tujuan adalah bentuk upaya holistik menuju pencapaian tujuan sebagai suatu proses. Keberhasilan dalam melaksanakan pengendalian merupakan salah satu proses untuk mencapai tujuan

b. Pelaksanaan

Agar pencapaian tujuan semakin terjamin dan efektif maka diperlukan jadwal pelaksanaan kegiatan yang jelas agar dapat memaksimalkan waktu dalam pelaksanaan penertiban.

penertiban anak sekolah bolos di Kabupaten Garut pada dasarnya telah berjalan dengan baik dan berhasil, namun memang masih terdapat banyak kendala termasuk sulitnya pemahaman masyarakat terhadap ketertiban dan keindahan lingkungan. Bahwa penertiban anak sekolah bolos yang dilakukan oleh aparat dengan mengantarkan murid dan menyerahkan muridnya kepada pihak sekolah, dan pihak sekolah memberikan sanksi yang dirasakan belum optimal.

c. Sasaran

Sasaran merupakan bagian dari proses dalam suatu kegiatan yang berperan untuk memastikan agar program pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan kegiatan wawancara bersama Bapak Bapak Drs. Bambang Hapid Arifin, M.Si sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (9 Februari 2023)

Pelaksanaan penertiban kepada ANSEBOL itu sifatnya rutin dan tidak terikat waktu, jika ada kesempatan kami akan melaksanakan pelaksanaan penertiban

dengan mendatangi langsung tempat tersebut yang telah di tinjau atau bahkan berdasarkan laporan warga bahwa penertiban anak sekolah bolos di wilayah Kabupaten Garut, secara hukum dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa dasar penertiban anak sekolah bolos sesuai dengan perda, sehingga fungsi guna dari lahan harus dikembalikan pada fungsinya Yang benar. Sehingga masyarakat yang diresahkan akibat perilaku oknum anak yang ditimbulkan oleh anak sekolah, selanjutnya akan dapat dioptimalkan.

2. Integrasi

Integrasi adalah bagian persatuan setiap proses tahapan pelaksanaan sosialisasi yang terjadi di lapangan dan kemampuan seorang pimpinan satuan polisi pamongpraja untuk dekat dengan pegawainya bahkan dengan instansi atau OPD lain penting untuk dimiliki, karena dengan adanya kedekatan, suasana kerja yang tercipta akan kondusif bagi setiap pegawai dan kondusif

a. sosialisasi

Sosialisasi penertiban anak sekolah bolos di wilayah Kabupaten Garut secara hukum dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa dasar penertiban anak sekolah bolos telah memenuhi peraturan perundang-undangan setempat, sehingga harus mengembalikan fungsi dari pendidikan. Bagi yang kehilangan pendidikan untuk belajar, nantinya akan dibuka kembali uang SPP yang Gratis, begitu pula dengan beasiswa pasti banyak tersedia.

b. Proses

Proses penertiban anak sekolah bolos di wilayah Kabupaten Garut pada dasarnya sesuatu hal yang memang harus dilakukan berhasil, namun memang masih terdapat banyak kendala termasuk sulitnya para anak sekolah bolos untuk diamankan. Bahwa penertiban anak sekolah bolos Yang dilakukan oleh aparat akan membantu masyarakat tenang dalam beraktifitas dan pedagang toko kelontong tidak khawatir apabila ada murid sekolah yang membeli rokok dan berdiam di toko.

c. Prosedur

Penertiban anak sekolah bolos secara rasional sudah sesuai prosedur dan mekanisme Yang benar. Dengan ditertibkannya, maka akan memberikan dampak yang positif lingkungan menjadi tentram, dan ada rasa aman nyaman.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kesesuaian penegakan hukum atau pegawai dengan menyesuaikan dengan kondisi aktual sebagai bentuk pemaksimalan program dalam melakukan tugas yang diberikan akan melakukan dengan kesungguhan. Terdapatnya siswa yang melakukan pendidikannya dengan kurang sungguh-sungguh dikarenakan siswa berpendapat bahwa kesungguhan dalam melakukan belajar tidak berdampak pada prestasi hasil nantinya. Hal tersebut melahirkan stereotip bahwa siswa sekolah yang selalu mendapat nilai baik akan dipandang oleh guru dan siswa lainnya lebih baik dibandingkan siswa yang nilainya kurang tetapi sudah berusaha. Sementara itu, responden yang melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh dan selalu sungguh-sungguh berpendapat bahwa hal tersebut akan memberikan hasil maksimal atas hasilnya.

a. Tindakan

Tindakan Pemantauan terhadap siswa yang membolos perlu dilakukan secara rutin untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Siswa yang disiplin dalam data kemudian diberikan instruksi dan bimbingan tambahan. Bagi anak-anak yang keras kepala, yang telah dihukum berkali-kali tanpa kembalian, sekolah akan menghentikan sekolah. Pendekatan ini tepat karena dipimpin oleh Satpol PP yang mandatnya di bidang penegakan hukum, namun dalam pelaksanaannya harus dibarengi dengan kesadaran penuh

b. Kemampuan

Penertiban anak sekolah bolos suatu hal Yang harus dilakukan, karena kemampuan da;am wilayah memiliki kewajiban untuk menjadikan wilayah Yang aman, tertib dan nyaman. Penertiban anak sekolah bolos Yang dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur kerja yang benar, karena penertiban yang dilakukan ada dasar hukumnya dan dilakukan oleh unit kerja yang memiliki kewenangan di bidang tersebut.

c. Sarana

Sarana yang digunakan penertiban anak sekolah yang dilakukan Oleh aparat Satpol PP yang sesuai dengan bagian dan beban kerjanya dan jajarannya, menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik. Hal ini terlihat lingkungan semakin kondusif dan nyaman, titik-titik yang dijadikan tempat pangkalan atau nongkrong anak sekolah, lambat laun mulai berkurang dan beralih menjadi kegiatan diluar sekolah yang sesuai prosedur sebagai fungsi semula dari sekolah dalam mensupport murid dalam bakatnya, jadi dilihat dari prosedur kerja, penertiban yang dilakukan sesudah sesuai prosedur dan mekanisme yang ada.

3.5. Diskusi Temuan Utama

Pelaksanaan Program penertiban ANSEBOL memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang lebih Tertib dan Nyaman. Penertiban ANSEBOL di Kabupaten Garut juga merupakan salah satu program pengembangan diri bagi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penulis menemukan temuan penting yakni Anak sekolah melakukan kegiatan membolos dikarenakan adanya ketidakpuasan dan ketidakinginan peserta didik terhadap partisipasi di kegiatan belajar mengajar disekolah maka dengan tugas dari datuan polisi pamong praja yang cukup baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah setempat dan pihak sekolah, serta adanya dukungan dari pihak swasta dan masyarakat. Sama halnya dengan Penelitian Feny Annisa Damayanti (2013) bahwa perilaku membolos itu dapat mempengaruhi nilai akademik disekolah, karena tidak bisanya menyelesaikan topik mata pelajaran pada hari itu juga, Disiplin Anak sekolah dalam belajar merupakan kunci berjalannya program Penertiban ANSEBOL di kawasan Kecamatan Kota Garut Kabupaten Garut.

Layaknya program lainnya, penertiban ANSEBOL ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah pemanfaatan media digital dalam pengembangan sosialisasi penertiban di Kabupaten Garut diakui belum maksimal, salah satunya dikarenakan oleh faktor lingkungan dan kemampuan siswa, layaknya temuan Salman (2022). Selanjutnya karakteristik dari program ini yakni program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong praja, jadi yang membuatnya lebih menarik lagi adalah dimana sekolah tidak dapat menerapkan hukuman putus sekolah (DO) di wilayah kecamatan Kabupaten Garut. Hal ini yang membuat tugas satuan polisi pamong praja tidak efektif dalam Penertiban ANSEBOL tetapi dengan berbagai masalah yang ada satuan polisi pamong praja

kabupaten garut yang saling bekerja memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing kelurahan untuk menampilkan penertiban ANSEBOL. Artinya pemerintah setempat berhasil menumbuhkan kesadaran atau disiplin anak sekolah sebagai salah satu prinsip tingkat efektivitas yang sesuai dengan hasil penelitian Warsito (2011) Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu menertibkan anak sekolah dan mengurangi tingkat pelanggaran ANSEBOL dan meningkatkan SDM baik di dalam Kedisiplinannya ataupun Kecerdasan anak sekolah di kabupaten

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan keberadaan Satpol PP sebagai organisasi memegang peranan penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam penelitian ini, peran Satpol PP dalam menjaga keamanan, ketertiban dan ketertiban masyarakat, difokuskan pada penertiban anak-anak yang jauh dari rumah untuk melakukan kegiatan yang dilarang khususnya di kawasan perkotaan Jalan Garut. Terlihat Satpol PP telah berupaya keras untuk mendisiplinkan siswa yang tidak hadir. Namun, penertiban yang dilakukan Satpol PP tidak memperhitungkan anak yang membolos, seperti kembali melakukan aktivitas gangguan masyarakat dan tetap masih ada yang membolos karena pihak sekolah sulit untuk mendisiplinkannya atau memberi sanksi setelah Satpol PP melaksanakan penertiban tersebut. Pengendalian membolos pada dasarnya cukup baik, efektif, karena rata-rata hasil wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar pengendalian anak putus sekolah memberikan dampak positif, antara lain: lingkungan menjadi tertib, aman, nyaman, tercapainya tujuan pendidikan merupakan syarat khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Garut terhadap kegiatan siswa SD hingga SMA yang sering bolos sekolah dan melakukan pelanggaran disiplin. mengatur atau melakukan kegiatan yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat seperti (menyetir secara ugal-ugalan, minum-minum) untuk mengurangi ruang bagi siswa yang membolos untuk mencegah tindakan siswa mengarah pada perilaku kriminal

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni seperti humanisme, Siswa sensitif dan membolos menunjukkan bahwa sekolah tidak dapat menerapkan hukuman putus sekolah (DO) di wilayah kecamatan Kabupaten Garut, sehingga Satpol PP kesulitan dalam penegakannya sehingga penerapannya tidak tepat .

Arah Masa Depan Penelitian/Future Work.. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program penertiban anak sekolah bolos di Kabupaten Garut untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Dan peneliti memberikan beberapa saran terkait penelitian kedepannya yaitu ;

1. Pemerintah Kabupaten Garut harus memberikan dukungan penuh kepada Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan, seperti menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar pada saat pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar
2. Bagi siswa yang membolos khususnya di wilayah Kota Garut perlu mengetahui tugas Satpol PP untuk menegakkan peraturan dan segera menertibkan setiap membolos dengan tidak menimbulkan masalah kekacauan kota.
3. Mengingat hasil diskusi menunjukkan bahwa penertiban siswa membolos di Kabupaten Garut cukup efektif, maka disarankan agar Satpol PP terus melaksanakan

sosialisasi kegiatan penertiban program agar siswa membolos dan masyarakat memahami pentingnya penertiban siswa membolos. ketertiban lingkungan, agar secara sukarela dan sadar siswa tidak masuk sekolah dan masyarakat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP.

4. Membuat Format surat pengunduran diri bagi siswayang telah mendapatkan surat peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali dari pihak sekolah. Yang dimana surat pengunduran diri tersebut di tanda tangani oleh pihak keluarga dari siswa yang bermasalah tersebut sehingga pihak sekolah tidak sewenang wenang dalam mengeluarkan siswa yang bermasalah. Format surat pengunduran dan sistem teknis kerja dari surat pengunduran diri tersebut di sosialisasikan oleh dinas pendidikan kepada setiap sekolah dasar hingga menengahpertama atau atas agar lebih merata dalam penyampaian informasi, dan menambahkefektifan dan efisiensi dari kinerja satuan polisi pamong praja Kabupaten Garut dalam menertibkan anak sekolah bolos (ANSEBOL).

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Nandar ahmad faizal (<https://anggaran.kemenkeu.go.id/>)
- Nazarudin. (2007). Manajemen Pembelajaran. Yogyakarta : Teras.
- Hurlock, Elizabeth. (2009). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Erlangga.
- Maulia Indriana Ghani (<https://www.zenius.net/blog/materi-sosiologi-nilai-dan-norma-sosial>)
- Gunarsa, Singgih dan Ny. Y. Singgih, (2002). Psikologi Untuk Membimbing. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- peraturan bupati Garut nomor 65 tahun 2021 tentang rencana kerja satuan polisi pamong praja
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan r & D)*, 22nd ed. Bandung: ALFABETA, hlm. 308.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Hardani., dkk, (2020) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group